

UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA MELALUI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI YANG BERKELANJUTAN

Ulfa Tarina¹, Indah Cahyaning Prihastuti²
ulfatarina@gmail.com¹, indahcahyaning114@gmail.com²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan ekonomi setiap daerah adalah dengan membentuk Program Padat Karya Tunai (PKT). Padat karya tunai merupakan program pemerintah yang pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan marginal sehingga hasil yang diharapkan dari program ini adalah berkurangnya angka tingkat kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis target/sasaran, faktor pendukung dan hambatan, dampak, dan strategi dalam meningkatkan keberhasilan program PKT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian yang didapat bahwa program PKT ini memberikan dampak positif sebagai salah satu program pemerintah dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana yang lebih baik dan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan strategi yang penting sehingga realisasi yang dihasilkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dengan anggaran yang efisien.

Kata kunci: kemiskinan, padat karya tunai, program berkelanjutan.

ABSTRACT

The government's effort to increase economic equality in each region is by establishing a Cash Intensive Work Program (PKT). Cash labor intensive is a government program that empowers communities, especially poor and marginalized communities, so that the expected result of this program is a reduction in poverty rates. The aim of this research is to analyze targets/objectives, supporting factors and obstacles, impacts and strategies in increasing the success of the PKT program. The research method used is a qualitative descriptive method with a literature study approach. The research results showed that the PKT program had a positive impact as one of the government's programs in supporting poverty alleviation through community empowerment. Better fund management and involving community participation are important strategies so that the resulting realization can absorb more workers with an efficient budget.

Keywords: poverty, cash labor intensive, sustainable program.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat suatu negara untuk memajukan ekonominya dan menjadi negara maju. Kualitas Sumber Daya Manusia yang menurun salah satu alasan kuatnya adalah kemiskinan yang membuat akses pendidikan, kesehatan, dan produktivitas terhambat. Pada tahun 2022, World Population Review (WPR) mencatat bahwa Indonesia berada pada urutan ke 73 sebagai negara termiskin di dunia (Triono & Sangaji, 2023). PBB menjelaskan bahwa kemiskinan ini terjadi karena tidak adanya pilihan suatu individu untuk mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan hidupnya. Hingga saat ini, kemiskinan menjadi isu klasik dan terjadi di seluruh negara termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, kemiskinan sudah menjadi persoalan dari dulu hingga sekarang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan angka penduduk miskin. Pada tahun 2023, penduduk miskin mencapai 25,89 juta yang pengeluaran per bulannya di bawah standar garis kemiskinan. Angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 26,16 juta penduduk miskin, berkurang hingga 270 ribu penduduk miskin. Namun, pada tahun 2020

dan 2021, Indonesia mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19 yang memberikan dampak dan tekanan hampir pada seluruh sektor terutama sektor ekonomi. Selain faktor khusus tersebut, Sabri et al. (2023) mengatakan bahwa pada umumnya, masyarakat yang mempunyai pendapatan dan pengeluaran di bawah standar garis kemiskinan menderita permasalahan kesehatan seperti kekurangan gizi, permasalahan pendidikan seperti tingkat buta huruf yang tinggi, dan lingkungan yang buruk.

Pada umumnya, tingkat kemiskinan lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2023 mencapai 14,16 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan 11,74 juta jiwa. Penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa dibandingkan kota adalah tidak meratanya pertumbuhan ekonomi setiap daerah yang dibuktikan oleh tingginya disparitas pendapatan tiap daerah. Penanganan masalah kemiskinan desa telah menjadi perhatian serius pemerintah sekaligus upaya dilakukan dalam meratakan pertumbuhan ekonomi tiap daerah. Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 395,7 triliun untuk dana desa dalam membiayai program-program yang dapat menjadi alat untuk membangun ekonomi desa (Farida et al., 2022).

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di desa, salah satunya dengan program pemberdayaan masyarakat. Dana yang dipunyai setiap desa diperuntukkan untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Endah (2020) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai dorongan untuk membangkitkan potensi yang ada pada setiap individu atau kelompok. Dorongan potensi tersebut diharapkan dapat menghasilkan perubahan masyarakat yang berdaya guna dan dapat memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Dengan begitu, dampaknya pada perekonomian pedesaan yang lebih maju dapat membuat pemerataan ekonomi dapat dirasakan seluruh wilayah dan kalangan.

Salah satu program pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan pengentasan kemiskinan adalah program padat karya tunai. Program tersebut dimulai dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tahun 2017 yang memanfaatkan penyaluran Dana Desa untuk program Padat Karya Tunai (PKT) agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga Dana Desa ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Program Padat Karya Tunai adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan targetnya dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya, serta mendukung penurunan angka stunting. Program ini dikhususkan untuk penduduk miskin seperti masyarakat yang termasuk dalam DTKS (PKH, Bansos maupun BLT). Program ini yang merupakan program pemberdayaan masyarakat, memberikan peluang langsung kepada masyarakat dalam mencari pekerjaan, termasuk bagi mereka yang kehilangan penghasilannya atau kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan Kementerian PUPR, pada Oktober 2023, salah satu program PKT yang berjalan di bidang sumber daya air sudah mencapai 85,62% capaian pelaksanaan fisik. Dengan capaian pelaksanaan tersebut, serapan tenaga kerja yang sudah tercapai adalah 273.641 orang. Anggaran yang dikeluarkan untuk bidang sumber daya air ini oleh Kementerian PUPR pada tahun 2023 mencapai 4,68 triliun dengan target serapan 321.939 tenaga kerja. Program PKT tersebut merupakan salah satu program yang sudah dilaksanakan dengan serapan tenaga kerja mencapai ratusan ribu. Terdapat program PKT

lainnya yang menjadi program pemberdayaan masyarakat untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja terutama di daerah pedesaan. Dengan demikian, program PKT diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan membantu untuk mengurangi ketimpangan kemiskinan di setiap daerah.

Pelaksanaan program PKT juga menjadi salah satu tujuan SDGs yang kesepuluh, yaitu mengurangi kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan kesepuluh SDGs adalah mengurangi persentase tingkat kemiskinan kebijakannya seperti meningkatkan peluang kerja meningkatkan kualitas pekerja. Hal tersebut diimplementasikan dengan pembentukan Padat Karya Tunai yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan bentuk program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan SDGs ini bukan hanya berfokus kepada aspek ekonomi, namun juga bergantung pada aspek sosial dan aspek pembangunan yang berupa berkelanjutan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan.

Aspek sosial dan pembangunan yang selaras dengan SDGs 10 dan diimplementasikan melalui salah satunya program PKT ini keberhasilannya harus memperhatikan partisipasi masyarakat. Teori komunikasi partisipatif menjelaskan penggunaan dialog atau konvergensi sebagai prinsip pelaksanaan suatu program atau merangkum solusi dari suatu permasalahan. Pelaksanaan program PKT tanpa mengikutsertakan masyarakat dapat menyebabkan ketidakcapaian kesepakatan dan keberhasilan yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, komunikasi partisipatif menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan upaya kemiskinan dengan program pemberdayaan masyarakat ini. Pemberdayaan masyarakat harus memfokuskan solusi dari permasalahan bersama dengan komunikasi partisipatif/konvergensi yang bersifat dua arah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis target atau sasaran dari kinerja program Padat Karya Tunai. Untuk menganalisis faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai. Untuk menganalisis dampak program Padat Karya Tunai dalam mengurangi kemiskinan. Untuk menganalisis bagaimana strategi dalam meningkatkan keberhasilan program Padat Karya Tunai.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan sudut pandang penulis serta berdasarkan peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana program padat karya dapat mengupayakan dalam pengentasan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dalam program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi dan mewujudkan keberhasilan dari teori komunikasi pembangunan berdasarkan dengan pengumpulan data dan pemahaman serta mempelajari teori-teori dari berbagai literatur. Metode penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2019:4).

LANDASAN TEORI

Teori Komunikasi Partisipatif

Teori komunikasi pembangunan partisipatif merupakan model yang menjelaskan bahwa elemen masyarakat sangat penting partisipasinya dalam proses pembangunan dan masyarakat dapat mengembangkan kompetensinya sebagai bentuk partisipasi. Teori ini menekankan bahwa komunikasi yang efektif terjadi ketika semua pihak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertukaran informasi, gagasan, dan pandangan.

Proses perubahan sosial dalam masyarakat akan terus terjadi karena adanya perubahan akan kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan tiap masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok. Cara yang baik untuk menghadapi proses perubahan sosial tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang tepat, tapi juga pendekatan atau partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi perubahan dan pembangunan dalam mencapai hidup layak dan sejahtera.

Kemiskinan

Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan dalam mengidentifikasi kemiskinan tersebut dan dimana keberadaannya. Menurut Tadoro (1994) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara yang berkembang disebabkan oleh antara lain:

1. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan
2. Perbedaan sejarah, dimana dalam hal ini sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan.
3. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia,
4. Perbedaan peranan sektor swasta dan Negara
5. Perbedaan struktur industrinya
6. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain
7. Perbedaan pembagian kekuasaan struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Menurut Bank Dunia, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar kehidupan minimum (Hidayati, 2015). Nugroho mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif pada suatu wilayah yang masyarakatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sesuai dengan adat istiadat yang ada (Rini dan Sugiharti, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah suatu kondisi dimana masyarakat memiliki rata-rata pengeluaran per kapita yang berada dibawah garis kemiskinan yakni garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan (BPS, 2020).

Padat Karya Tunai

Padat karya tunai merupakan program pemerintah yang pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendukung penurunan angka stunting. Padat Karya merupakan salah satu bentuk Community Driven Development (CDD) yang pengembangan masyarakat yang menekankan pada kontrol komunitas terhadap pengambilan keputusan dan sumber daya investasi (PKN-STAN, 2018).

Dengan anggaran yang besar, padat karya tunai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam Buku Pintar Dana Desa, (Kemenkeu RI, 2017: 80) ditentukan bahwa kriteria tersebut meliputi :

1. Penganggur, yaitu penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
2. Setengah Penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, dan masih mencari pekerjaan/masih bersedia menerima pekerjaan. Jam kerja normal setara dgn 35 jam dalam seminggu.
3. Penduduk Miskin, yaitu penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita/bulan di bawah garis kemiskinan.

Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan sejak lama sudah menjadi perbincangan para ahli. Namun, istilah keberlanjutan (sustainability) sendiri baru muncul satu setengah abad kemudian. Setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan

ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis).

Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengubah suatu keadaan hidup menjadi lebih baik (Tuokuua, Kpinpuob, & Hinsonc, 2019). Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat merupakan bagian dari visi skenario sosial serta peningkatan ekonomi (Bickler, Morton, & Menne, 2020). Pembangunan berkelanjutan bertujuan memberi kemudahan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan (Lin, Shen, Zhou, & Lyu, 2020). Dengan demikian pembangunan berkelanjutan adalah program yang membawa perubahan dan energi baru bagi hidup warga negara agar lebih sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target/sasaran Kinerja Program Padat Karya Tunai di Pedesaan

Sasaran yang dilakukan pada program ini yaitu terdiri dari masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur, dan keluarga yang memiliki balita bermasalah gizi. Program ini diharuskan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal. Pengerjaan program padat karya tunai tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor, melainkan secara swakelola oleh masyarakat dan 30 persen dari nilai proyek ini wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja, dan harus dibayar harian atau mingguan. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) didampingi oleh fasilitator yang memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan. Dengan ini masyarakat sasaran akan melakukan analisis situasi dengan mengangkat kondisi sosial masyarakat sasaran, memunculkan kebutuhan akan permasalahan kondisi rawan sanitasi.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Program Padat Karya Tahun 2020 (orang)

K/L	Target	Realisasi
Kementerian Pertanian	2.000.000	1.634.814
Kementerian Perhubungan	27.029	23.592
Kementerian Kelautan & Perikanan	1.379	15.190
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	595.142	680.221
Jumlah	2.623.550	2.353.817

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa target yang dilakukan oleh setiap kementerian berbeda-beda. Dimana hal ini dipengaruhi oleh besaran anggaran yang diterima. Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa angka realisasi jauh lebih besar dibandingkan targetnya. Selisih dari target dan realisasi pada kementerian ini yakni sebesar 13.841 orang. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut kepada masyarakat sekitar pesisir laut dan pelaku usaha wisata berbasis kelautan (bahari) yang terdampak Covid-19 berupa restorasi pada terumbu karang dengan dibuatnya taman serta kebun dari karang atau dengan sebutan Indonesian Coral Reef Garden (ICRG). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk menjadi produktif melalui pemanfaatan tenaga kerja sekitar dan sumber kemampuan yang dimiliki.

Sementara pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan angka realisasinya justru tidak melebihi target. Pada tahun 2020, kementerian pertanian sendiri memiliki besaran target yang terbanyak dengan jumlah 2.000.000 orang namun hanya

81,74% yang terealisasi. Sedangkan pada Kementerian Perhubungan itu sendiri juga memiliki besaran target 27.029 orang dan yang terealisasi hanya 87,28%. Target ini sudah cukup dikatakan baik karena sudah menyentuh angka lebih dari 60%. Kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil merealisasikan 680.221 orang. Pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat pedesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Program Padat Karya Tahun 2021 (orang)

K/L	Target	Realisasi
Kementerian Pertanian	583.600	580.211
Kementerian Perhubungan	42.217	62.947
Kementerian Kelautan & Perikanan	6.212	4.368
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	1.290.000	1.587.583
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.060	7.350
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60.797	17.222
Jumlah	1.987.886	2.259.681

Berdasarkan tabel, data kementerian yang menerima anggaran untuk program ini berbeda dari tahun 2020. Pada tahun 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Hidup dan Kehutanan yang memiliki target untuk menjalankan program ini. Pada kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki target yang paling kecil yakni hanya 5.060 orang dengan berhasil direalisasikan sebesar 7.350 orang. Sedangkan pada Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat memiliki target sebesar 1.290.000 orang dan terealisasi sebesar 1.587.583 orang.

Program padat karya pada Kementerian Perhubungan dilaksanakan dengan pemanfaatan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung seperti transportasi, jalan, dan pemeliharaan fasilitas sisi udara serta pemeliharaan pada gedung kantor. Selain itu, target yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan yakni sebesar 42.217 orang dengan realisasi sebesar 62.947 orang. Kemudian program ini di Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yaitu di bidang infrastruktur pertanian yang meliputi pengembangan jaringan irigasi tersier (JIT), perpompaan, perpipaan, embung pertanian, optimasi lahan, lahan konservasi dan rehabilitasi serta padat karya percontohan.

Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai

Dalam sebuah perencanaan program pastinya terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat jalannya program tersebut. Program padat karya tunai ini, memiliki faktor penghambat yaitu:

1. Adanya keterlambatan material atau bahan yang diperlukan dalam melaksanakan program ini. Biasanya, dikarenakan faktor cuaca ekstrim sehingga mengganggu dalam proses pengiriman barang.

2. Kurangnya tenaga fasilitator yang mengajarkan keterampilan kepada masyarakat
3. Kurangnya anggaran dana yang diterima dan juga terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada di lapangan.
4. Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan penyelewengan dana, kualitas pekerjaan yang rendah, dan tidak tercapainya target program.
5. Keterbatasan infrastruktur pendukung yang tidak dapat menjangkau lokasi pelaksanaannya program ini.
6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tujuan dan manfaat program PKT dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam program.

Selain itu, adapun faktor pendorong yang berpengaruh dalam pelaksanaan program ini, diantaranya:

1. Sumber daya masyarakat yang tersedia khususnya masyarakat penganggur. Program ini merupakan program yang dikhususkan untuk masyarakat miskin, menganggur dan stunting yang terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT).
2. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program padat karya tunai sangat berperan penting. Pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat untuk menyukseskan program ini.
3. Kesiapan lembaga dan keefektifitasan dari lembaga yang menaungi program ini.
4. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat menyediakan tambahan sumber daya, teknologi, dan keahlian yang mendukung pelaksanaan proyek.
5. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai program ini terkait tujuan dan manfaatnya sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dampak Program Padat Karya Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan Indonesia

Permasalahan kemiskinan pada setiap individu mempunyai banyak faktor yang berbeda. Individu yang kekurangan modal, pendapatan yang minim, tertinggal dari persaingan pasar mengakibatkan produktivitas yang menurun. Produktivitas yang rendah tersebut justru akan berlanjut pada pendapatan yang rendah sehingga kembali pada kurangnya modal individu tersebut. Isu kemiskinan ini banyak terjadi di daerah pedesaan sehingga pemerintah berusaha mengalokasikan Dana Desa untuk meningkatkan produktivitas dan menyerap tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan program PKT ini berhasil menyerap tenaga kerja hingga mencapai ratusan ribu pekerja.

Penyerapan tenaga kerja program PKT di Indonesia dapat mencapai angka jutaan tenaga kerja yang berhasil terserap. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada masa pandemi tahun 2020, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program ini mencapai 20,27 triliun yang dialokasikan pada 4 K/L, diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan total alokasi dana tersebut, penyerapan tenaga kerja yang berhasil direalisasikan adalah 2.353.817 orang. Sedangkan pada tahun 2021, serapan tenaga kerja mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dengan alokasi anggaran yang justru lebih besar, yaitu mencapai 30,84 triliun dan 2.259.681 tenaga kerja yang berhasil terserap. Alokasi anggaran yang lebih besar dapat disebabkan oleh bertambahnya K/L yang melaksanakan program PKT, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2022, Kementerian PUPR mencatat penyerapan tenaganya mencapai 1.064.994 orang dengan anggaran 12,56 triliun. Berdasarkan angka penyerapan tenaga kerja tersebut, dampak program PKT ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan penyerapan tenaga kerja dari berbagai kegiatan pelaksanaan program. Kegiatan program ini dapat dilihat dari pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan,

pemanfaatan lahan (produksi pertanian, peternakan, perikanan), kegiatan pemberdayaan masyarakat (pengelolaan lingkungan pemukiman, pengelolaan limbah, pengembangan energi terbarukan), dan kegiatan lainnya dalam mengoptimalkan sumber daya lokal yang berkelanjutan.



Grafik 1. Persentase Penduduk Miskin Pedesaan Indonesia Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dampak program PKT dalam mengurangi kemiskinan terutama di pedesaan juga dapat dilihat dari data persentase penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Berdasarkan grafik 1, persentase penduduk miskin terus menurun hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 13,2%. Kemudian pada tahun 2021, menurun signifikan hingga 12,53 persen atau berkurang 0,9 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing persentase angka penduduk miskin adalah 12,36% dan 12,22%.

Dengan angka kemiskinan di daerah pedesaan yang terus menurun pada tahun dimana program PKT juga berjalan, hal ini menunjukkan program PKT ini memberikan dampak positif sebagai salah satu program pemerintah dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan alokasi dana dengan pengelolaan yang lebih efisien. Selain itu, program PKT juga merupakan implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Program yang memberikan akses pada pekerjaan melalui pemberdayaan, membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan penyerapan tenaga kerjanya, dan meningkatkan infrastruktur lokal ini mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyatakan bahwa kepedulian penggunaan anggaran desa diarahkan pada aplikasi untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, program PKT ini diharapkan dapat menjadi program berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan desa.

Strategi Meningkatkan Keberhasilan Program Padat Karya Tunai

Tujuan program PKT dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia tetap harus memperhatikan pengelolaan dana dengan realisasi penyerapan tenaga kerjanya. Mengikutsertakan masyarakat dalam keberhasilan program juga menjadi hal penting karena jika respon yang didapatkan positif, maka masyarakat sebagai sasaran juga dapat membantu mewujudkan permasalahan lingkungan dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi (Novanto & Wibawani, 2023).

Upaya atau strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai keberhasilan program PKT yang lebih efektif adalah pengelolaan dana yang lebih transparan. Pengelolaan dana seharusnya menjadi strategi terpenting karena akan berdampak pada

realisasi yang lebih efektif. Dana yang pengelolaannya tepat dapat berdampak pada pencegahan penyalahgunaan keuangan serta dapat memastikan dana yang digunakan tepat untuk kebutuhan masyarakat. Dana Desa yang digunakan untuk program PKT ini dapat menjadi strategi pemerintah dalam mengalokasikannya supaya realisasi yang dihasilkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dengan anggaran yang efisien. Pada tahun 2021, alokasi dana yang digunakan kurang efisien karena penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan tahun 2020 yang lebih sedikit aplikasinya.

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program PKT dalam meratakan ekonomi tiap daerah adalah ikut melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Program PKT ini dapat lebih tepat sasaran jika perencanaannya juga melibatkan masyarakat sehingga kebutuhan dalam program pemberdayaan masyarakatnya lebih terarah. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah memampukan masyarakat untuk meningkatkan peluang sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Dengan begitu, partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Program ini juga dapat dijadikan program berkelanjutan sehingga pemerataan ekonomi daerah di Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan.

KESIMPULAN

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di desa, salah satunya dengan program pemberdayaan masyarakat dengan Program Padat Karya tunai. Sasaran yang dilakukan pada program ini yaitu terdiri dari masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur, dan keluarga yang memiliki balita bermasalah gizi. Program padat karya tunai ini memiliki faktor penghambat yaitu kurangnya tenaga fasilitator yang mengajarkan keterampilan kepada masyarakat, kurangnya anggaran dana yang diterima dan juga terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada di lapangan, kurangnya pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah pengelolaan dana yang lebih baik supaya realisasi yang dihasilkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dengan anggaran yang efisien. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan juga menjadi hal penting. Program PKT ini memberikan dampak positif sebagai salah satu program pemerintah dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan alokasi dana dengan pengelolaan yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, W. & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol.09, No.01, April 2024.
- Azra, S., & Afif, Y. K. (2024). Analisis Strategi Program Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Kajian dan Riset Mahasiswa*, 1(1), 105-119.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat*, Vol.6, 135-143.
- Farida, A., Arifuddin, M. H., Rahimi, N., & Kamarni, N. (2022). Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 191-205.
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021, 953-960.
- Novanto, E. H., & Wibawani S. (2023). Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.14, No.2, 2023.

- Pawening, A. S., & Lestari, P. (2020). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *PERSPEKTIF*, 10(2), 739–753.
- Sabri, Kuliman, Febrianti, E., & Asnah. (2024). Implikasi Globalisasi Dan Kemiskinan di Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 145-154.
- Sofi, I. (2020) Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Inovasi Kebijakan*.
- Suharyani, D. Y., & Djumarno (2023). Perencanaan Strategis dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Global Education*
- Triono, T. A., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59–67.
- Wadu, B.L., Ladamay I., & Jenia A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 10, Nomor 1, Mei 2020*.